

Tasyri' Vol. 22, Nomor 1, April 2015**PENDIDIKAN BERBASIS *INTELLECTUAL DEMOCRACY***

Abd. Rouf

(Pendidik di SMPN 41 Surabaya)

Abstrak

Pendidikan merupakan media untuk meningkatkan kualitas manusia terdidik. Dari para manusia terdidik tersebut diharapkan berbagai persoalan sosial yang dihadapi manusia dapat diselesaikan. Oleh karena itu, muatan pendidikan semestinya berisi tentang beragam problem sosial masyarakat yang akan dicarikan solusinya melalui praktik pendidikan. Materi pendidikan –dengan demikian- tidak hanya berisi tentang teori-teori belaka, tetapi meliputi data faktual mengenai problem masyarakat yang ada dan terjadi. Tulisan ini merupakan ide yang mendorong gagasan perlunya pendidikan berbasis kepentingan masyarakat dalam dunia pendidikan. Jadi pendidikan merupakan aktifitas yang berupaya mencari solusi dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh peserta didik khususnya dan manusia pada umumnya. Demi mencapai hal tersebut di atas, tidak ada salahnya jika meminjam teori pendidikan Paulo Freire yang dialogis, kontekstual, memberikan penyadaran, berpihak pada kaum miskin, dan membebaskan manusia dari segala praktik penindasan, juga meminjam teori pendidikan Confusius dengan konsep ”*Intellectual Democracy*”, sebagai inspirasi kritis terhadap penyelenggaraan pendidikan di negeri ini, agar keberadaannya lebih dinamis dan menyentuh kepentingan masyarakat secara nyata.

Kata Kunci: *Intellectual Democracy* dan *Pendidikan Masyarakat*

A. Pendahuluan

Pendidikan di suatu negara selalu diarahkan dalam rangka mencapai kemajuan dan perkembangan sebuah peradaban. Penilaian maju-mundur atau berkembang-tertinggalnya peradaban suatu negara biasanya bertolak ukur pada kualitas penyelenggaraan pendidikan. Apabila pendidikan suatu negara berkualitas tinggi, maka peradabannya pun bisa dikatakan maju, namun sebaliknya, bila pendidikan suatu negara berkualitas rendah, maka peradabannya pun akan tertinggal. Pendidikan perlu diarahkan untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan peradaban. Salah satu ide

pengembangan pendidikan yang bisa diterapkan adalah Pendidikan Berbasis Intellectual Democracy.

Pendidikan Berbasis Intellectual Democracy (demokrasi intelektual) merupakan program pengembangan pendidikan dari, oleh, dan untuk peserta didik. Tipe pengelolaan pendidikan seperti ini merupakan perwujudan kebijakan otonomi penyelenggaraan pendidikan dimana peserta didik dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dimotivasi secara maksimal. Hal ini merupakan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pendidikan. Pemerintah kemudian mengambil posisi sebagai fasilitator, motivator, bukan aktor dan bukan menjadi penentu kebijakan arah pendidikan.¹¹³

B. Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia

Kondisi penyelenggaraan pendidikan saat ini, dapat dikatakan banyak tidak sejalan dengan realitas sosial, pelaksanaan pendidikan sering kurang mampu memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam menyelesaikan persoalan sosial yang melingkupinya. Padahal semestinya, setiap proses pendidikan harus mengandung berbagai materi pelajaran dengan muatan problem sosial yang signifikan, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga *output*-nya memiliki kompetensi untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Diakui atau tidak, keberlangsungan pendidikan seringkali tidak berakar dari persoalan riil masyarakat atau siswa pada suatu daerah. Dalam konteks Indonesia, misalnya, data empiris menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia berada di pedesaan, yang notabene adalah masyarakat agraris. Ternyata, dalam praktik pendidikan hampir tidak berorientasi pada problem mereka. Praktik pendidikan yang demikian itu, disinyalir membuat *output* bahkan *outcome*-nya menjadi asing dan tidak mengenal persoalan yang sedang terjadi di sekitarnya; bahkan tidak sedikit lulusan pendidikan tinggi yang cenderung melecehkan kehidupan dan pekerjaan masyarakat petani meskipun mereka berasal dari keluarga petani.

¹¹³Ali Riyadi, *Politik Pendidikan, Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: Ar-Ruzza, 2006).

Kondisi tersebut muncul karena peserta didik lebih banyak menerima praktik pendidikan model perkotaan yang bergaya masyarakat industrial, sehingga muncul ketidakpercayaan diri mereka atas profesi sebagai petani. Mereka lebih memilih gaya hidup sebagai priyayi dengan fenomena rebutan menjadi pegawai negeri atau bekerja di kantor setelah lulus.

Ketidakberhasilan membentuk hasil pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, sesungguhnya seringkali menghambat keberhasilan agenda pembangunan daerah yang sudah dicanangkan. Kasus tersebut terjadi karena proses pendidikan yang tidak bersentuhan langsung dengan persoalan kehidupan yang dihadapi oleh peserta didik dan masyarakat. Oleh karena itu, reformasi radikal dalam pendidikan sangat diperlukan, apalagi dalam konteks otonomi daerah saat ini. Penyelenggaraan pendidikan harus dibuat sedemikian rupa agar berkorelasi dengan kebutuhan mendasar masyarakat, yang pada akhirnya membawa kebijakan pendidikan yang selaras dengan pemenuhan keberhasilan program otonomi (desentralisasi) pendidikan di setiap daerah.

Otonomi pendidikan mengisyaratkan adanya sistem pendidikan yang bersifat lokalitas masyarakat. Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat atau peserta didik tidak tersingkir dari akar kebudayaan mereka sendiri. Dengan demikian, relasi antara penyelenggaraan pendidikan dengan situasi lokal yang membutuhkan penjelasan dan pengenalan terhadap pendidikan suatu daerah menjadi lebih komprehensif, sehingga pendidikan bersifat kontekstual. Oleh karena konteks masyarakat suatu daerah dengan daerah lain itu berbeda, maka pembuatan kurikulum pendidikan, harus disesuaikan dengan konteks masyarakat yang bersangkutan.

Desentralisasi pendidikan, yang diwujudkan dalam bentuk peralihan kewenangan dari pusat ke daerah, sebenarnya bertujuan agar setiap daerah mampu memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pendidikan nasional pada umumnya dan pendidikan daerah pada khususnya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah agar mampu dihadapkan pada wacana global. Sebagai contoh, lembaga pendidikan di daerah pesisir yang terkenal dengan pantai dan tambak, hendaknya memberikan penekanan pada pembelajaran kehidupan bermasyarakat dalam konteks kelautan dan perikanan, sehingga sumber daya alam dapat dioptimalkan dan sumber daya manusia dapat diarahkan pada lapangan kerja tersebut. Dengan demikian, lembaga pendidikan harus

lebih banyak bermuatan kurikulum lokal berupa materi ajar yang terkait dengan kondisi daerah yang bersangkutan, agar masyarakat setelah lulus dari sekolah dapat mengembangkan dunia usaha di daerahnya secara optimal dan lebih produktif.

C. Intellectual Democracy

Pada era sekarang, yang penuh dengan nilai-nilai kritis terhadap segala bentuk kemapanan yang tidak humanis, pendidikan perlu diarahkan untuk menjadi media kritis terhadap segala bentuk kemapanan yang tidak humanis tersebut. Ia harus mendorong proses humanisasi pada setiap manusia, terutama peserta didik. Pendidikan juga harus berperan dalam proses pembebasan dari kebodohan, kemiskinan, penindasan, dan segala bentuk keterbelakangan dari berbagai aspek kehidupan yang dialami masyarakat.¹¹⁴

Selain itu, karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius, maka muatan pendidikannya tidak dapat lepas dari dimensi ilahiyah, sehingga pada era sekarang pendidikan juga harus mendorong proses transendensi seorang hamba (peserta didik) kepada Tuhannya. Dengan demikian, pendidikan merupakan manifestasi dari pendidikan yang kritis terhadap segala realitas kehidupan, sehingga dalam prosesnya harus diupayakan sedemikian rupa agar dapat membimbing peserta didik ke arah penalaran kritis dan transformatif terhadap dunia serta mewarnainya dengan nilai-nilai universal.

Dalam rangka merealisasikan hal tersebut, maka proses yang dilakukan dalam pembelajaran pendidikan harus bersifat dialogis. Ini perlu dilakukan dalam rangka menghargai potensi, bakat, dan harkat manusia sebagai peserta didik. Proses dialogis juga diupayakan untuk memberikan penyadaran kepada peserta didik akan realitas diri dan lingkungannya. Dari situ –tidak berlebihan- jika dalam mengaktualisasikan proses pembelajaran menggunakan model intellectual democracy. Ini merupakan langkah penting untuk memicu daya kritis dan kreativitas peserta didik.

Intellectual democracy berasal dari bahasa Inggris; *intellectual* dan *democracy*. *Intellectual* berarti cendekiawan, cerdas pandai, menurut akal, mengenai akal, menurut

¹¹⁴ Jalaludin Rahmat, *Islam Alternatif* (Bandung: Mizan, 1989).

kecerdasan, dan intelektual; sedangkan *democracy* berarti demokrasi. Berdasarkan banyak literatur, dalam kaitannya dengan politik, demokrasi berasal dari bahasa Yunani; *demos* dan *kratos* yang bermakna *demos* itu rakyat, sedangkan *kratos* itu pemerintahan; jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat (dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat). Dalam konteks pendidikan, berarti pendidikan itu “dari”, “oleh” dan “untuk” peserta didik (masyarakat).

Intellectual democracy (demokrasi intelektual) ini diterapkan oleh Confusius (seorang filsuf Cina abad ke-6 SM.) dalam memberikan pendidikan kepada murid-muridnya di sekolah (baca: kelas). Dalam penerapan *intellectual democracy*, seorang pendidik harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada murid agar melakukan percobaan-percobaan sendiri guna menemukan kebenaran-kebenaran. Prinsipnya, bahwa maju dan berkembangnya kecerdasan seorang murid itu ditentukan oleh murid sendiri. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan pendamping murid.¹¹⁵

Dalam penerapan *intellectual democracy*, guru tidak boleh sedikitpun mendiktekan –secara paksa- sesuatu kebenaran kepada murid-muridnya. Murid-murid harus berfikir mandiri, dan apabila kebenaran menurut mereka bertentangan dengan kebenaran yang diajarkan oleh gurunya, mereka diberi kesempatan untuk mengemukakan argumentasinya dan mendiskusikannya guna memberikan kejelasan akan kebenaran yang ditemukannya. Inilah konsep *intellectual democracy*, yakni suatu konsep pembelajaran cerdas pandai yang bersifat demokratis (dari peserta didik, oleh peserta didik, dan untuk peserta didik).

Dalam *intellectual democracy*, peserta didik harus diberi kemandirian untuk mengembangkan intelektualitasnya. Jika murid diberi kemandirian dalam berfikir, maka segala potensi yang dimiliki akan teraktualisasikan dan terarahkan secara progresif; sebaliknya, jika murid dikekang/dihegemoni dalam proses pembelajaran, maka potensi yang dimiliki tidak akan tersalurkan secara progresif. *Intellectual democracy* mengajarkan kepada murid-muridnya agar berpikir mandiri, tidak mudah menerima pendapat orang lain dan harus melakukan analisa kritis. Guru harus rela

¹¹⁵ Muhammad Fahmi, “*Intellectual Democracy: Paradigma Pendidikan Islam Era Posmodern*” *Jurnal Nizamia* (Surabaya: Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, 2007)

menerima kritik dari murid-muridnya dan dari siapa saja. Dalam teori *intellectual democracy*, penerimaan murid dilakukan bukan atas dasar keturunan dan derajat seseorang tetapi berdasarkan pada kemauan dan kesungguhannya.

Menurut *intellectual democracy*, hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain harus dilakukan secara demokratis. Proses demokratisasi antar manusia bisa dimulai melalui jalur pendidikan. Dalam pandangan tersebut, semua manusia bebas berfikir. Meski demikian, murid-murid harus selalu berhati-hati dan tidak sembarangan dalam berfikir, dan apa yang telah difikirkan diupayakan dapat menjawab problem kehidupannya.

Penerapan pembelajaran dengan model *intellectual democracy* memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada murid agar melakukan percobaan-percobaan sendiri guna menemukan kebenaran-kebenaran. Di samping itu, pendidik harus memegang prinsip timbal balik (*principle of reciprocity*) dalam pendidikan dan pembelajaran kepada peserta didik. Prinsip timbal balik ini mengindikasikan bahwa hubungan guru-murid adalah dalam posisi subjek-subjek; bukan subjek-objek. Objek dalam pembelajaran adalah realitas problem sosial yang dialami masyarakat –disamping materi-materi *teks book* sebagai penguatan domain teoritis.

Model pendidikan dan pengajaran jenis *intellectual democracy* telah banyak diujicobakan dan dikembangkan dalam sistem pendidikan modern –bahkan di era sekarang (posmodern), yakni dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mencari dan melakukan berbagai percobaan sendiri guna memperoleh masukan-masukan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi yang bersangkutan dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian jika hasilnya positif dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat luas.¹¹⁶

Intellectual democracy ini kemudian berkembang sedemikian rupa sehingga seseorang dapat berfikir kritis dan tidak begitu saja menerima fakta yang dihadapi, akan tetapi justru mencoba mencari berbagai alternatif baru dalam usaha untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam masyarakat. Pembelajaran model *intellectual*

¹¹⁶ Lasiyo, *Neo-Confucianisme* (Yogyakarta: Fak. Filsafat UGM, 1993).

democracy ini dapat dikatakan sejalan dengan model demokrasi pendidikan (*education democracy*) atau pendidikan dialogis (*education of dialogue*) ala Paulo Freire, yang saat ini banyak diterapkan di Indonesia khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya.

Paulo Freire juga terkenal dengan ide pendidikan kontekstual. Pendidikan kontekstual (berbasis realitas sosial) adalah sebuah teori dan model pendidikan yang mengupayakan peserta didik untuk menjadi subjek dalam rangka menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam realitas sosial. Menurut Freire, manusia adalah pencipta sejarahnya sendiri. Keberadaan manusia dalam sistem hadap masalah sebagai makhluk yang berada dalam proses “menjadi” dan belum selesai serta tidak lengkap dalam menghadapi realitas. Kodrat tidak selesainya manusia dalam menghadapi persoalan sosial mengakibatkan pendidikan menjadi suatu kegiatan yang berlangsung tiada batas sebagai praktik pembebasan.¹¹⁷ Apabila selama ini pendidikan memitoskan realitas dunia untuk menutupi realitas yang sebenarnya, maka dalam sistem pendidikan kontekstual (hadap masalah) realitas sosial harus menjadi demitologi.

Penerapan pendidikan kontekstual akan dapat menumbuhkan interaksi manusia dengan dunianya, karena tugas pendidikan kontekstual adalah problematisasi realitas sosial (politik, budaya) menjadi bagian dari manusia sebagai peserta didik. Pedagogi Freire membuat tiga skema dalam merumuskan pendidikan kontekstual. *Pertama*, investigasi, yaitu pengujian dan penemuan kesadaran manusia yang bersifat tahayul, naif, dan kritis. *Kedua*, tematisasi, yaitu pengujian semesta tematis dengan reduksi, penemuan tema-tema generatif yang baru yang tersirat dalam tema-tema sebelumnya. *Ketiga*, problematisasi, yaitu penemuan situasi-situasi rumit dan tindakan-tindakan terbatas yang mengarah pada praktik otentik tindakan kultural permanen untuk pembebasan.

¹¹⁷ Paulo Freire, *Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan*, terj. Nugroho (Jakarta: Gramedia, 1984).

D. Pendidikan Berbasis Kepentingan Masyarakat

Pendidikan berbasis kepentingan masyarakat dapat dilakukan melalui empat strategi pokok.¹¹⁸

Pertama, peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan. Semua warga harus diberi akses pendidikan yang sama, apapun tingkat ekonomi mereka, di mana pun tempat tinggal mereka, dan apa pun latar belakang sosial mereka. Sebagai bagian dari strategi ini, mulai tahun 1984 negara Indonesia telah menerapkan wajib belajar enam tahun. Sejak tahun 1994, batasan wajib belajar adalah sembilan tahun. Wajar sembilan tahun ini telah meningkatkan prosesntasi anak usia sekolah (7-12 tahun) yang bersekolah dari hanya sebesar 41,4 % pada akhir Pelita I (1969/1970) menjadi 93,49 % pada akhir Pelita V. Bahkan untuk menunjang pemerataan tersebut, pemerintah juga memberikan bantuan operasional sekolah (BOS) kepada setiap peserta didik (SD, SMP serta SMA dan tingkat yang sederajat).

Kedua, peningkatan relevansi pendidikan dengan pembangunan (*link and match*). Strategi kedua untuk meningkatkan pendidikan berbasis masyarakat adalah konsep *link and match* (keterkaitan dan kesepadanan) antara materi ajar (kurikulum) dengan kebutuhan di lapangan (*job market*). Penerapan konsep *link and match* diharapkan dapat melahirkan para lulusan yang memiliki jenis keterampilan yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia kerja, sehingga ketika lulus mereka siap kerja. Dengan demikian, kurikulum pendidikan harus mengandung muatan lokal.

Ketiga, peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan "Sistem Pembinaan Profesional" (SPP) dengan pendekatan gugus sekolah. Satu hingga delapan sekolah dasar yang lokasinya berdekatan dikelompokkan dalam satu gugus, lalu salah satu sekolah ditunjuk sebagai sekolah inti dan yang lainnya menjadi sekolah unit-unitnya.

Keempat, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hingga tahun 1998 atau saat runtuhnya rezim orde baru, program pembangunan pendidikan lebih terfokus pada aspek kuantitas. Pada era otonomi daerah, program-program pembangunan

¹¹⁸ M. Sirozi, *Politik Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 203-210.

pendidikan sudah mulai terfokus pada aspek kualitas, relevansi, dan efisiensi, dengan tetap memperhatikan aspek kuantitas. Lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi didorong untuk mengembangkan program-programnya secara sangat efisien.

E. Penutup

Konsep pendidikan berbasis kepentingan masyarakat amat relevan dengan konteks dunia pendidikan dewasa ini. Relevansi tersebut terjadi tidak hanya bagi pelaksanaan pendidikan di Indonesia, tetapi di dunia pada umumnya. Menurut ide pendidikan berbasis kepentingan masyarakat, tradisi pendidikan di Indonesia - disamping merupakan pertukaran ide-ide dan bukan hanya pendiktean ide-ide- haruslah dilakukan dengan mendiskusikan semua problem kehidupan yang ada, kemudian dicarikan ide penyelesaian bersama melalui proses yang dialogis.

Muatan pendidikan perlu berangkat dari realitas sosial masyarakat, kemudian realitas tersebut diintegrasikan ke dalam teori-teori pendidikan, lalu didiskusikan bersama peserta didik. Peserta didik diberi kebebasan untuk mengemukakan ide-idenya dalam rangka mencapai solusi dari masalah-masalah yang terjadi. Peserta didik seharusnya diperbolehkan mempunyai pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lain, bahkan dengan gurunya sekalipun. Pendidikan bukan semata-mata merupakan proses pendiktean mata pelajaran kepada siswa tanpa boleh dibantah. Pendidikan harus dapat menyadarkan peserta didik akan realitas sosial serta dapat membebaskan masyarakat dari kebodohan dan segala bentuk penindasan yang terjadi.

Demi mencapai hal tersebut di atas, tidak ada salahnya jika meminjam teori pendidikan Paulo Freire yang dialogis, kontekstual, memberikan penyadaran, berpihak pada kaum miskin, dan membebaskan manusia dari segala praktik penindasan, juga meminjam teori pendidikan Confusius dengan konsep "*Intellectual Democracy*", sebagai inspirasi kritis terhadap penyelenggaraan pendidikan di negeri ini, agar keberadaannya lebih dinamis dan menyentuh kepentingan masyarakat secara nyata.

Di era kontemporer, pendidikan diharapkan bukan sekedar sebagai proses penanaman nilai-nilai moral untuk membentengi diri dari eksese negatif globalisasi

ansich, tetapi yang paling urgen adalah bagaimana nilai-nilai moral yang telah ditanamkan pendidikan tersebut mampu berperan sebagai kekuatan pembebas (*liberting force*) dari himpitan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan sosial, budaya, dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Riyadi, *Politik Pendidikan, Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: Ar-Ruzza, 2006).
- Jalaludin Rahmat, *Islam Alternatif* (Bandung: Mizan, 1989).
- Lasiyo, *Neo-Confucianisme* (Yogyakarta: Fak. Filsafat UGM, 1993).
- M. Sirozi, *Politik Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Muhammad Fahmi, “*Intellectual Democracy: Paradigma Pendidikan Islam Era Posmodern*” *Jurnal Nizamia* (Surabaya: Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, 2007)
- Paulo Freire, *Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan*, terj. Nugroho (Jakarta: Gramedia, 1984).

